



## BAB III

### Analisis Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis

#### 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

##### 3.1.1 Permasalahan Ekonomi Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dengan aspek ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Rendahnya Derajat Kemandirian Fiskal daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini berarti, derajat ketergantungan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.
2. Rendahnya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya kinerja SKPD terkait dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Terbatasnya jenis dan objek pajak dan retribusi yang dipungut dalam rangka meningkatkan PAD. Disamping itu, belum maksimal upaya yang telah dilakukan untuk



- kebijakan diversifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
4. Masih kecilnya pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah. Penggunaan aset daerah harus dilakukan secara optimal dalam rangka peningkatan PAD.
  5. Perolehan laba dari BUMD milik Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum ada karena BUMD tersebut masih dalam tahap penumbuhkembangan.
  6. Penumbuhkembangan agroindustri untuk peningkatan nilai tambah dari komoditas unggulan sektor pertanian belum dilakukan secara maksimal.
  7. Ekspor non-migas masih rendah karena nilai tambah produk ekspor non-migas yang masih rendah dan daya saing produk tersebut juga masih rendah.
  8. Pengangguran masih merupakan permasalahan yang perlu penanganan yang serius. Disamping persoalan kemampuan daya serap tenaga kerja pada dunia usaha, pengangguran juga disebabkan oleh ketidaksesuaian latar belakang pendidik pencari kerja, dan kompetensi yang dimiliki dibandingkan dengan kebutuhan dunia usaha.
  9. Kurangnya daya tarik investor untuk berinvestasi karena lemahnya daya dukung infrastruktur dan sistim pelayanan perizinan yang belum standar.



10. Kecenderungan berlanjutnya alih fungsi lahan yang potensial bagi tanaman pangan dan hortikultura ke perkebunan sawit, sehingga terjadi penurunan luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura.
11. Rendahnya produktifitas lahan dan tingginya kesenjangan produktifitas karena belum optimalnya penggunaan teknologi dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur pertanian.
12. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan tingginya angka kemiskinan nelayan dan petani tanaman pangan, khususnya padi pasang surut.
13. Terbatasnya daerah tangkapan ikan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan daerah tetangga dan nelayan asing.
14. Kualitas SDM nelayan dan terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga tidak maksimal dalam pengelolaan hasil tangkap serta pembudidaya ikan.
15. Tingginya tingkat kerusakan produksi perikanan karena belum semua nelayan memiliki alat penyimpanan ikan yang baik.
16. Meningkatnya pencurian ikan dan terjadinya *over-fishing* serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.



17. Penerapan teknologi budidaya ikan belum baik, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
18. Tenaga penyuluh teknologi perikanan masih sedikit khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan. Sehingga penerapan teknologi perikanan menjadi belum maksimal.
19. Kondisi transportasi antar kawasan sentra produksi maupun yang menuju ke daerah pemasaran masih belum baik sehingga posisi tawar petani dalam menjual hasil produksinya menjadi rendah.
20. Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang kurang berkembang karena permasalahan pada SDM khususnya masalah ketrampilan tenaga kerja, penguasaan teknologi, kemampuan manajerial dan akses permodalan dan kemampuan perluasan pasar.
21. Peranan lembaga koperasi dan lembaga keuangan mikro dalam ekonomi pedesaan masih sangat rendah dikarenakan pengembangan kelembagaan tersebut masih belum inovatif.



### **3.1.2 Permasalahan Sumberdaya Alam dan Lingkungan**

1. Penguasaan IPTEK tentang deposit dan sebaran sumberdaya mineral masih terbatas sehingga kegiatan eksplorasi dan eksploitasi juga masih terbatas pada migas yang dikelola perusahaan asing.
2. Kondisi sumberdaya manusia masih minimal sehingga pengelolaan sumberdaya alam belum optimal.
3. Pelestarian SDA belum maksimal dilakukan, akibatnya daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam semakin berkurang.
4. Kondisi lahan yang umumnya berada di dataran rendah dengan jenis tanah gambut merupakan lahan marginal yang memerlukan biaya besar dan teknik khusus dalam upaya pengelolaannya.
5. Terbatasnya jalan usaha tani untuk mengangkut hasil tanaman pangan dan hortikultura serta belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu dan alat mesin pertanian.
6. Daya saing ekonomi produk pertanian tanaman pangan yang relatif rendah mengakibatkan banyaknya lahan pangan berubah fungsi menjadi lahan perkebunan.
7. Kondisi fisik lahan dan jaringan infrastruktur yang kurang memadai mengakibatkan meningkatnya biaya



transportasi hasil pertanian. Hal ini memicu harga jual di tingkat petani rendah.

8. Keterbatasan anggaran pembangunan sehingga sektor pertanian belum mendapat alokasi dana yang cukup untuk memacu pembangunan pertanian

### **3.1.3. Permasalahan Infrastruktur Daerah**

1. Kondisi rusak dan rusak berat pada jalan kabupaten masih cukup tinggi dan jalan dengan permukaan tanah juga masih mendominasi.
2. Sebaran jalan dengan permukaan aspal masih belum merata sehingga masih banyak desa yang belum menikmati kelancaran transportasi.
3. Kondisi fisik tanah yang didominasi tanah gambut membuat biaya pembangunan infrastruktur menjadi tinggi dan resiko kerusakannya juga lebih tinggi.
4. Fluktuasi debit air sungai selama musim kemarau dan hujan tinggi sehingga menjadi faktor yang mengganggu aktifitas transportasi sungai.
5. Terbatasnya infrastruktur pendukung transportasi seperti pelabuhan/dermaga untuk transportasi laut/sungai dan jembatan.



#### **3.1.4 Permasalahan Kebutuhan Dasar dan Sosial Budaya**

1. Kualitas infrastruktur kesehatan khususnya puskesmas dan puskesmas pembantu belum standar.
2. Kualitas tenaga medis seperti bidan desa dan perawat masih rendah.
3. Kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas masih rendah dan belum standar.
4. Masih didapati anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan kesadaran masyarakat untuk bersekolah masih relatif rendah.
5. Belum meratanya sebaran pendidikan yang berkualitas setiap desa dan kecamatan.
6. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti buku, alat-alat praktik, alat peraga dan alat-alat laboratorium.
7. Alokasi guru dan tenaga pendidik yang tidak merata antar sekolah dan antar daerah sehingga standar pelayanan minimal untuk proses belajar mengajar belum terpenuhi.
8. Pemanfaatan potensi kepariwisataan belum didukung oleh infrastruktur dan kesiapan masyarakat setempat.



9. Penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah maupun budaya nasional yang unggul masih terbatas guna menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.
10. Peran masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya masih rendah.
11. Minat pemuda maupun organisasi kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan dalam kewirausahaan masih kurang.
12. Pemuda yang terlibat dalam kasus Narkoba cenderung meningkat. Hal ini akan merusak masa depan pemuda tersebut dan perlu upaya pencegahan dan rehabilitasi.
13. Media yang dapat memfasilitasi pemuda dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah masih terbatas, terutama pemuda di pedesaan.
14. Terbatasnya ruang politik yang layak digunakan masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan berlanjut.



### **3.1.5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Politik**

1. Belum terintegrasikan dan sinkronnya peraturan dan perundang-undangan daerah. Hal ini dikarenakan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) belum melalui kajian naskah akademik, sehingga berlakunya Perda tidak efektif bahkan tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Aparatur pemerintahan pembangunan cenderung belum bersikap sebagai pelaksana pelayanan publik. Masyarakat pun terlanjur menganggap Aparatur sebagai pihak yang harus dilayani. Kondisi ini cenderung menyebabkan terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.sistem
3. Sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih lemah menyebabkan aparatur cenderung melanggar disiplin dan kinerja birokrasi menjadi rendah.
4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam sistem pelayanan perizinan belum berfungsi sebagai 'pintu terpadu'. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Tupoksi Kantor PTSP dan wewenang yang dimiliki oleh



- Kantor PTSP baru sebatas wewenang administratif dan koordinatif dan bukan wewenang pokok dalam perizinan.
5. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah.
  6. Partipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi seperti Pemilu sudah cukup tinggi, namun belum dilandasi oleh pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap pilihannya.
  7. Walaupun UU memberikan kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di lembaga legislative. Kenyataan yang ditemui, laki-laki masih tetap dominan di lembaga tersebut karena pemahaman masyarakat yang cenderung memosisikan perempuan sebagai pelengkap dalam kehidupan politik dan demokrasi.

### **3.2 Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu keadaan yang kemungkinannya terjadi di masa mendatang dan berdampak besar terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, isu strategis harus dikelola secara serius melalui program dan kebijakan pembangunan daerah. Isu strategis harus menjadi dasar dalam penentuan prioritas



pembangunan daerah khususnya untuk jangka panjang. Dalam menentukan isu strategis, digunakan pendekatan wewenang, dimana pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah yang dinyatakan sebagai tugas wajib dan tambahan. Berdasarkan limpahan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun RPJP Daerah dapat merupakan pula isu strategis yang menjadi sasaran pada RPJP tersebut. Adapun isu-isu strategis yang dimaksud adalah:

- a. Peningkatan pengelolaan potensi pesisir, pantai dan lautan dalam rangka pengembangan sektor perikanan, budidaya tanaman laut dan pariwisata.
- b. Peningkatan pengelolaan sumberdaya penduduk yang menjamin tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. Yang berbasis potensi daerah. Hal ini diarahkan pada upaya pengembangan politeknik agri industri dan kemaritiman.
- c. Peningkatan pengelolaan tata ruang yang berkualitas dan berimbang di Kawasan Strategi. Terutama sekali diarahkan pada penataan zonasi, khususnya untuk kawasan strategis ujung jabung dan perlindungan lahan pangan yang berkelanjutan.



- d. Pengembangan 8 (delapan) Kawasan Strategi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu (1) Kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur; (2) Kawasan Pelabuhan Muara Sabak Barat; (3) Kawasan Perindustrian Muara Sabak Barat; (4) Kawasan Rantau Rasau dan sekitarnya; (5) Kawasan Minopolitan Nipah Panjang dan sekitarnya; (6) Kawasan Pulau Berhala; (7) Kawasan Ekonomi di Kecamatan Sadu; (8) Kawasan Strategi Industri Pertambangan Geragai.
- e. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang mampu mendorong perkembangan perekonomian daerah. Perlu dilakukan peningkatan kondisi jalan. Saat ini terdapat 470,18km jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Demikian juga halnya dengan upaya peningkatan kondisi jembatan dan dermaga. Saat ini masih terdapat 376 unit jembatan dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan. Disamping itu, pembangunan pelabuhan Samudeera di Ujung Jabung dan pengembangan pelabuhan Muara Sabak menjadi pelabuhan dalam negeri perlu segera dilakukan untuk pengembangan ekonomi daerah dan kawasan;



- f. Peningkatan sumberdaya alam secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat guna peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut. Disamping itu juga diarahkan pada upaya penguatan ketahanan pangan dan mengeliminir terjadinya kerentanan pangan.
- g. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus berimbang antara manfaat ekonomi dengan manfaat sosial-budaya;
- h. Peningkatan pengelolaan sumberdaya pertanian yang berkualitas yang menjamin berkelanjutan dalam satu sistem pertanian terpadu dan ketersediaan pangan. Khusus untuk subsektor perkebunan, perlu dikembangkan potensi kelapa dalam, melalui upaya peningkatan produktivitas dan peremajaan.
- i. Peningkatan pengentasan kemiskinan bersamaan dengan peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Terutama sekali diarahkan pada kelompok masyarakat nelayan dan petani gurem dalam upaya mengatasi masalah permodalan dan peralatan sarana produksi.
- j. Peningkatan tata kelola Rumah Tangga yang mampu dan cerdas dalam mengelola pendidikan, kesehatan dan tatanan nilai kehidupan sosial, budaya;



- k. Peningkatan kesadaran masyarakat taat hukum berbarengan dengan pengembangan demokrasi, perkuatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- l. Peningkatan kinerja aparat pemerintah dalam penciptaan birokrasi yang inovatif dan kreatif guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan daya saing daerah. Hal ini akan dapat terimplementasi melalui pengembangan e-goverment, e-procurement, perampingan organisasi dan penguatan fungsinya.
- m. Peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dalam satu sistem layanan informasi yang transparan untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik;
- n. Pengelolaan anggaran belanja daerah harus dapat menjamin teralokasinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Minimal alokasi anggaran untuk belanja langsung 60 persen dan untuk belanja tidak langsung 40 persen.